



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BOGOR TAHUN  
ANGGARAN 2015-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

Antania Hanjanilia Ristiyana

022117264

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2021**



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BOGOR TAHUN  
ANGGARAN 2015-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. CFE)

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BOGOR TAHUN  
ANGGARAN 2015-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Selasa Tanggal: 3 Agustus 2021

**Antania Hanjanilia Ristiyana**

0221 17 264

Menyetujui,

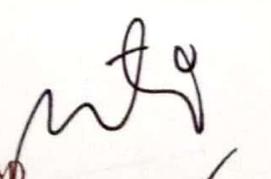
**Ketua Sidang**  
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA)



**Ketua Komisi Pembimbing**

(Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFA., CA., QIA.   
CGCAE., ASEAN CPA)

**Anggota Komisi Pembimbing**

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antania Hanjanilia Ristiyana

NPM : 022117264

Judul Skripsi : Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan  
Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2021

MATERAI 6000

Antania Hanjanilia Ristiyana  
022117264

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

ANTANIA HANJANILIA RISTIYANA. 022117264. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020. Di bawah bimbingan: ERNADHI SUDARMANTO dan RETNO MARTANTI ENDAH LESTARI. 2021.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi termasuk dalam masa pandemi covid-19 serta bertujuan untuk mengetahui pengaruh diantara kedua variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Jenis penelitian ini adalah verifikatif. Objek penelitian yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Sumber data dari Laporan Realisasi Anggaran. Unit analisis menggunakan geografic regional. Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis t menggunakan aplikasi SPSS Ver 26.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemkot Bogor selalu mengoptimalkan dalam meningkatkan PAD, hal tersebut terangkum dalam program kegiatan. Pemerintah Kota Bogor mencari jalan agar penerimaan daerah tetap berjalan walaupun di masa pandemi dengan memberikan *Treatment* yaitu memudahkan layanan menjadi basis elektronik dan keringan pembayaran. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor terpantau cukup baik. Kota Bogor sebagai kota yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dibidang jasa dan perdagangan. Namun pada saat tahun 2020 pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor turun bahkan menyentuh persentase negatif yakni -0,53. Upaya Pemerintah Kota Bogor memulihkan perekonomian melalui kegiatan UMKM maupun vaksinasi yang dilakukan di ballroom mall-mall di Kota Bogor yang salah satu tujuannya adalah untuk menarik pengunjung untuk melakukan kegiatan pembelian barang dan jasa. Pengaruh pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor pada tahun anggaran 2015-2020 adalah negative/tidak berpengaruh. Dengan hasil pengujian nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,091 yang berarti  $>$  dari 0,05 dan Thitung sebesar 0,743. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,091 > 0,05$ ) dimana nilai t hitung  $<$  t tabel ( $2,218 < 2,77645$ ) maka  $H_3$  nya ditolak.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "**Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020**".

Dalam proses penyelesaian proposal penelitian ini tentu saja terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun Alhamdulillah terlepas dari itu penulis tetap bersungguh-sungguh, semangat serta tiada henti berdoa dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Dalam pembuatan skripsi ini segala proses di dalamnya penulis mendapatkan pencerahan, bantuan, dan petunjuk dari banyak pihak secara langsung dan tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan sehingga proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT telah memberikan banyak sekali nikmat, karunia, hidayah, perlindungan, kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Mama dan Alm. Bapa yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat dan doa tiada henti untuk keberhasilan penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kakak-kakakku, para keponakanku, dan keluarga besar yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa selama penyusunan.
4. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Chaidir., S.E., MM. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan sekaligus Dosen Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., Ak., AWP., CTCP., C.F.A. selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
10. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE.,CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
12. Seluruh staff Tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
13. Seluruh pegawai Bapenda Kota Bogor dan Badan Pusat Statistik Kota Bogor yang telah memberikan bantuan dan kerjasama sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
14. Teruntuk Febi Herlis Setiawan yang selalu memberikan *support* dan doa selama penyusunan penelitian ini.
15. Teruntuk sahabat-sahabatku SMP, SMA, dan Kuliah EUNOIA yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, sudah saling *support* dan doa.
16. Teruntuk teman-teman kelas G Akuntansi angkatan 2017 selama 3 tahun lebih selalu bersama, kelas yang penuh suka, duka serta semangat selama perkuliahan di kelas.
17. Teman-teman Organisasi HMA FEB-Unpak dan seluruh teman-teman FEB Unpak yang mewarnai hariku dan berproses memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran diluar ilmu sks perkuliahan.
18. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dalam penyusunan dan penyelesaiannya Skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun kekurangan tersebut semoga menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Demikian penulis sampaikan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Juli 2021

Penulis

Antania Hanjanilia Ristiyana

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	<b>i</b>
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>ii</b>
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	<b>iii</b>
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....	<b>iv</b>
HAK CIPTA.....	<b>v</b>
ABSTRAK .....	<b>vi</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>vii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>ix</b>
DAFTAR TABEL.....	<b>xii</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.1.4. Pajak Daerah.....	9
2.1.5. Retribusi Daerah .....	13
2.1.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	18
2.1.7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	19
2.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	22
2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	22

2.2.2. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi .....	23
2.2.3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi .....	25
2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	25
2.2.5. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	30
2.3. Penelitian Sebelumnya .....	31
2.4. Kerangka Pemikiran .....	50
2.4.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	50
2.5. Hipotesis Penelitian .....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	52
3.2. Objek, Unit, dan Lokasi Penelitian.....	52
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	52
3.4. Operasionalisasi Variabel .....	52
3.5. Metode Penarikan Sampel .....	53
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	53
3.7. Metode Analisis.....	53
3.7.1. Statistik Deskriptif .....	54
3.7.2 Analisis Regresi Linear Sederhana .....	54
3.7.3. Pengujian Hipotesis .....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha Kota Bogor.....	56
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	58
4.2. Kondisi/Fakta/Pelaksanaan/Realisasi dari Variabel yang Diteliti Pemerintah Kota Bogor .....	60
4.3. Analisis Data .....	65
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	66
4.3.2. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	66
4.3.3. Analisis Uji Hipotesis .....	68
4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	69
4.4.1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015- 2020 .....	69

4.4.2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020 .....	70
4.4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	71
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Retribusi Daerah dengan Pajak Daerah.....	17
Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	22
Tabel 2. 3 Interpretasi Nilai Efektivitas .....	22
Tabel 2. 4 Penelitian Sebelumnya .....	31
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel .....	53
Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah) .....	60
Tabel 4. 2 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah) .....	60
Tabel 4. 3 Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 .....	61
Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah).....	62
Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah).....	63
Tabel 4. 6 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah) .....	63
Tabel 4. 7 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah) .....	64
Tabel 4. 8 Analisis Statistik Deskriptif .....	66
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Regresi Linear Sederhana.....	67
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial Uji t.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 .....	2
Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor TA 2015-2020 .....	4
Gambar 2. 1 Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah.....	21
Gambar 2. 2 National Income Accounting .....	23
Gambar 2. 3 Rasio Pertumbuhan Ekonomi.....	29
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Bogor.....	57
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 .....	62
Gambar 4. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan.....	82
Lampiran 2 Bagan Struktur Organisasi.....	83
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .....	84
Lampiran 4 Dokumentasi Foto.....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

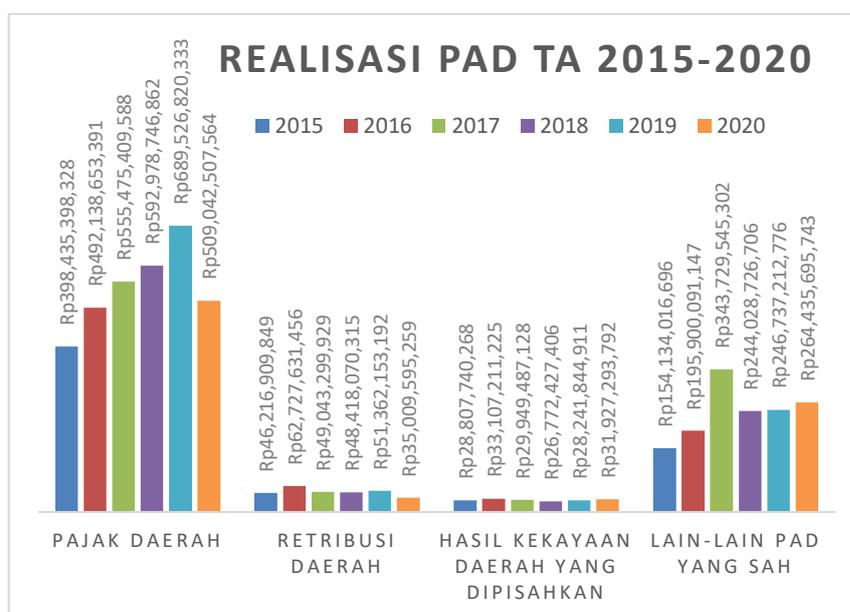
### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah menghadirkan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebuah fenomena yang muncul di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia setelah berlakunya era otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Rahmawati, Somaji dan Adenan, 2019) Secara garis besar, pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk solusi yang dilakukan oleh pemerintah tingkatkan dan samakan kesejahteraan masyarakat dengan mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otoritas di sektor keuangan pemerintah kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk mencari sumber peluang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini. Semenjak berlakunya otonomi daerah di Indonesia pemerintah pusat tidak lagi menangani persoalan daerah. Berbagai persoalan tersebut telah dialihkan dan dipegang oleh pemerintah daerah. Pembangunan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Dalam artian peran masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah. Menurut (Akmaliyah, 2013) Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Usaha tersebut selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi. Berbagai macam kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan secara optimal Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor ini, termasuk usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor di masa pandemi covid-19 dimana merupakan kejadian luar biasa yang harus sesegera mungkin menemukan

solusi dari setiap permasalahan yang ada. Menurut Bima Arya Walikota Bogor, pada Rakor Evaluasi PAD menyebutkan bahwa rakor evaluasi PAD bukan sekedar mengejar target rutin tahunan, namun dimaksudkan untuk membangun sistem agar PAD Kota Bogor bisa ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat (Kotabogor.go.id, 2019).

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi tentunya terdapat komponen khusus yang dapat mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Komponen khusus tersebut, tidak lain adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri yang terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang sah. Di dalam pendapatan asli daerah, pajak daerah adalah sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terbesar yang konsisten dibanding dengan 3 sumber lainnya. Berikut jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan observasi penelitian penulis di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, tidak ada pengadaaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak sarang burung walet sebab tidak ada objek pajaknya dan tidak tersedia di alam wilayah Kota Bogor. Berikut laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dalam Laporan Pendapatan Daerah:

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020



Sumber Data : Bapenda Kota Bogor (Diolah oleh penulis)

Gambar 1.1 merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memuat besaran pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Pada tahun 2015 yang ditandai berwarna biru tua, menghasilkan pajak daerah sebesar Rp398.435.398.328, retribusi daerah sebesar Rp46.216.909.849, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp28.807.740.268, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp154.134.016.696, sehingga pada tahun 2015 total PAD yang dihasilkan sebesar Rp627.594.065.141. Pada tahun 2016 yang ditandai berwarna merah, menghasilkan pajak daerah sebesar Rp492.138.653.391, retribusi daerah sebesar Rp62.727.631.456, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp33.107.211.225, dan lain-lain PAD sebesar Rp195.900.091.147, sehingga pada tahun 2016 total PAD sebesar Rp783.873.587.219. Pada tahun 2017 yang ditandai berwarna hijau menghasilkan pajak daerah sebesar Rp555.475.409.588, retribusi daerah sebesar Rp49.043.299.929, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29.949.487.128, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp343.729.545.302, sehingga total PAD pada tahun 2017 sebesar Rp978.197.741.947. Pada tahun 2018 yang ditandai warna ungu menghasilkan pajak daerah sebesar Rp592.978.746.862, retribusi daerah sebesar Rp48.418.070.315, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp26.772.427.406, dan lain-lain PAD sebesar 244.028.726.706, sehingga total PAD yang dihasilkan pada tahun 2018 sebesar Rp912.197.971.228. Pada tahun 2019 yang ditandai berwarna biru muda menghasilkan pajak daerah sebesar Rp689.526.820.333, retribusi daerah sebesar Rp51.362.153.192, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp28.241.844.911, dan lain-lain PAD sebesar Rp246.737.212.776, sehingga total PAD yang dihasilkan pada tahun 2019 adalah Rp1.015.868.031.212. Pada tahun 2020 yang ditandai warna orange menghasilkan pajak daerah sebesar Rp509.042.507.564, retribusi daerah sebesar Rp35.009.595.259, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp31.927.293.792, dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp264.435.695.743, sehingga total PAD yang dihasilkan pada tahun 2020 adalah Rp840.415.092.358. Berdasarkan penjelasan grafik diagram tersebut, perlu diperhatikan bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD yang lebih konsisten dalam menyumbang pendapatan asli daerah terbesar dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Namun, terdapat penurunan yang cukup tinggi pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2020, hal tersebut dikarenakan oleh penurunan konsumsi di Kota Bogor yang menyebabkan penurunan ekonomi yang cukup drastis saat pandemi covid-19. Menurut Deni Hendana Kepala Bapenda Kota Bogor menyebutkan bahwa upaya peningkatan realisasi pajak pada tahun dilakukan sejumlah terobosan terhadap bisnis baru yang muncul sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Harahap, 2020). Pada realitanya, pencapaian realisasi pajak daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil. Salah satu cara yang ditempuh agar teroptimalisasi penerimaan PAD adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD. Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melakukan sejumlah terobosan terhadap potensi wajib pajak di Kota Bogor serta mengoptimalkan

pendapatan di masa pandemi covid-19 ini. Pemerintah Kota Bogor pada APBD tahun anggaran 2020 menargetkan PAD sebesar Rp1,08 Triliun atau naik 6,44 persen dari tahun 2019, yang sebesar Rp947 Miliar. Sedangkan penerimaan dari sektor pajak pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp733 Miliar atau naik 34,74 persen dari penerimaan pajak tahun anggaran 2019 yang sebesar Rp544 Miliar (Harahap, 2020). Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi. Untuk saat ini, banyak sekali hambatan karena pandemi covid-19 yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020 yakni sebelum terjadinya kejadian luar biasa yaitu Pandemi Covid-19:

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor TA 2015-2020



Sumber data : BPS Kota Bogor (Diolah oleh penulis)

Gambar 1.2 merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor 2015-2019, berdasarkan data tersebut di tahun 2015 - 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,59 persen menjadi 6,73 persen. Tahun 2016 – 2017 turun 0,61 persen menjadi 6,12 persen. Lalu di tahun 2017 - 2018 Kota Bogor mengalami kenaikan 0,02 persen menjadi 6,14 persen. Tahun 2018 - 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,09 persen menjadi 6,05 persen dan terakhir pada tahun 2019 – 2020 terjadi penurunan drastis sebesar 6,58 persen. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor masih belum stabil karena terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Terlebih saat memasuki masa pandemi corona bahkan mengalami resesi perekonomian.

Berdasarkan peneliti terdahulu (Indriyani, 2019) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2011-2017. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor masih belum stabil karena terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Terlebih saat memasuki masa pandemi corona bahkan mengalami resesi perekonomian. Dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro. Sebab semenjak kejadian luar biasa yaitu adanya pandemi Covid-19 di tanah air menyebabkan perekonomian turun. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Objek-objek pajak yang seharusnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota Bogor pun ikut turun semenjak pandemi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020”**.

## **1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Terdapatnya kejadian luar biasa di ranah dunia mengakibatkan perubahan yang sangat besar di segala aspek kehidupan. Terutama aspek kesehatan dan juga perekonomian. Oleh karena itu, perekonomian regional di Kota Bogor terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Khususnya Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonominya. Sehingga, terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih mendalam adalah mengenai:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020?
2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020”. Selain itu juga sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu penulis yang sudah didapatkan selama perkuliahan.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.
2. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama perkuliahan. Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.

#### **2. Kegunaan Praktik**

Kegunaan praktik dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya :

##### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk melengkapi dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah serta membandingkan dengan aplikasi yang sesungguhnya di tempat penulis melakukan penelitian serta menjadi sumber informasi yang berguna untuk skripsi yang merupakan salah satu syarat menempuh kesarjanaan ini.

##### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi para mahasiswa yang meneliti tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi : a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, akan memberikan peningkatkan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah (Paat, Koleangan dan Rumate, 2019).

##### **2.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1), PAD bersumber dari :

###### **a. Pajak daerah**

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah menjadi sorotan publik yang dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah (Yasin, 2020). Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

###### **b. Retribusi daerah**

Retribusi daerah merupakan merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya

dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang disahkan.

Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah cukup jelas disebutkan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.1.3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Terdapat dasar hukum yang mengatur atas pendapatan asli daerah (PAD) ini yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **2.1.4. Pajak Daerah**

#### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi dan perluasan objek pajak daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.4.2. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

##### **1. Pajak Pusat**

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur oleh Undang-Undang (UU) dan hasilnya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

##### **2. Pajak Daerah**

Definisi pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4 (Empat) ciri pajak daerah adalah :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit mengatur mengenai :
  - 1) Nama, objek, dan Subjek Pajak.
  - 2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
  - 3) Wilayah pemungutan.
  - 4) Masa Pajak.
  - 5) Penetapan.
  - 6) Tata cara pembayaran dan penagihan.
  - 7) Kedaluwarsa.
  - 8) Sanksi administrative.
  - 9) Tanggal mulai berlakunya.

Selain 9 (Sembilan) ketentuan diatas, Perda mengenai pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai 3 (tiga) hal dibawah ini, yaitu :

- 1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- 2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.
- 3) Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut

- a. Pajak Provinsi, meliputi:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor.
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
  4. Pajak Air Permukaan.
  5. Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten / Kota, meliputi :
  1. Pajak Hotel.
  2. Pajak Restoran.
  3. Pajak Hiburan.
  4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perlu diperhatikan mengenai pajak daerah adalah bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota diatas. Bila potensi pendapatan daerah dirasa kurang memadai, maka pemerintah daerah dapat tidak memungut pajak dari jenis pajak provinsi dan pajak kota / kabupaten diatas. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten / kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Adapun jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kotamadya dan pengertiannya menurut UU No. 34 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel, menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak jika nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 7.500.000 dalam satu bulan dan tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Hiburan, menurut Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Tarif yang ditetapkan Pajak Hiburan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara pertunjukan film bioskop sebesar 31% (tiga puluh satu persen).
  - 2) Pertunjukan kesenian tradisional, sirkus, pameran seni, pameran busana sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 3) Pergerakan musik sebesar 15% (lima belas persen).
  - 4) Karaoke dan permainan bilyar sebesar 20% (dua puluh persen). Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya bertujuan untuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, dan memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat dan dibaca dari suatu tempat oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak Air Tanah, menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah. Pajak
- g. adalah pajak yang dikenakan penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

## **2.1.5. Retribusi Daerah**

### **2.1.5.1. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sesuai dengan penjelasan di atas, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, yaitu Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

### **2.1.5.2. Jenis-jenis Retribusi Daerah Beserta Tarifnya**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

## 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

- 10) Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- 13) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- 14) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

- 1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- 3) Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan

fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- 9) Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
- 10) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.

- 4) Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 6) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### 2.1.5.3. Perbedaan Retribusi Daerah Dengan Pajak Daerah

Tabel 2. 1 Perbedaan Retribusi Daerah dengan Pajak Daerah

	Retribusi Daerah	Pajak Daerah
Payung Hukum	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah.	Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Objek	Orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum, seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya.	Penghasilan, barang mewah, kendaraan, laba perusahaan, dan lain sebagainya.
Balas Jasa	Didapatkan secara langsung.	Tidak didapatkan secara langsung.

	Retribusi Daerah	Pajak Daerah
Lembaga Pemungut	Dipungut hanya oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	Dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### 2.1.5.4. Retribusi yang Terdapat di Kota Bogor

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, terdapat 3 (tiga) kategori retribusi daerah di Kota Bogor, antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan – Puskesmas
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman
  - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - e. Retribusi PKB – mobil penumpang – minibus
  - f. Retribusi PKB – mobil bus – bus
  - g. Retribusi – mobil barang/beban – light truck
  - h. Retribusi – mobil barang/beban – truck
  - i. Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran
  - j. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - k. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah – penyewaan tanah dan bangunan
  - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah – kendaraan bermotor
  - c. Retribusi terminal – tempat kegiatan usaha
  - d. Retribusi terminal – fasilitas lainnya di lingkungan terminal
  - e. Retribusi tempat khusus parkir
  - f. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong
  - g. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong
  - h. Retribusi pelayanan tempat olahraga
  - i. Retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga
  - j. Retribusi dan/atau penyedotan kakus
3. Retribusi Perizinan Tertentu
  - a. Retribusi izin mendirikan bangunan
  - b. Retribusi pemberian izin trayek kepada badan
  - c. Retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja

#### 2.1.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta. enis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta. (Sumber : bpkad.natunakab.go.id)

Di kota Bogor, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan data dari Bapenda Kota Bogor, antara lain :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, terdiri dari :
  - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar Banten
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada BPR
  - d. Bagian laba atas penyertaan modal pada PD. Pasar Pakuan Jaya

#### **2.1.7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Di kota Bogor, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan data dari Bapenda Kota Bogor, antara lain :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Terdiri dari :
  - a. Pelepasan hak atas tanah
  - b. Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai
2. Penerimaan jasa giro
  - a. Jasa giro kas daerah
  - b. Jasa giro pemegang kas
3. Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)
  - a. Kerugian barang
4. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - a. Bidang pendidikan
  - b. Bidang pekerjaan umum
  - c. Bidang perhubungan
5. Pendapatan denda pajak
  - a. Pendapatan denda pajak hotel
  - b. Pendapatan denda pajak restoran
  - c. Pendapatan denda pajak hiburan
  - d. Pendapatan denda pajak reklame
  - e. Pendapatan denda pajak parkir
  - f. Pendapatan denda pajak air bawah tanah
  - g. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - h. Pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
6. Pendapatan denda retribusi
  - a. Pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b. Pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan
7. Pendapatan dari pengembalian
  - a. Pendapatan dari pengembalian lainnya
8. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah
  - a. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa
  - b. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah bangun guna serah
9. Pendapatan BLUD
  - a. Pendapatan jasa layanan umum BLUD
  - b. Pendapatan hibah BLUD
  - c. Pendapatan hasil kerjasama BLUD
  - d. Pendapatan lain-lain BLUD

- e. Lain-lain PAD yang sah lainnya
  - f. Pendapatan denda atas pelanggaran perda
10. Pendapatan dana kapitasi JKN
- a. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Bogor Selatan
  - b. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Cipaku
  - c. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Bondongan
  - d. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Lawanggintang
  - e. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Bogor Timur
  - f. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Pulo Armin
  - g. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Bogor Tengah
  - h. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Sempur
  - i. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Gang Aut
  - j. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Belong
  - k. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Merdeka
  - l. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Semplak
  - m. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Pancasan
  - n. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Pasir Mulya
  - o. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Gang Kelor
  - p. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Sindang Barang
  - q. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Bogor Utara
  - r. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Tegal Gundil
  - s. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Warung Jambu
  - t. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Tanah Sareal
  - u. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Pondok Rumpit
  - v. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Kedung Badak
  - w. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Kayumanis
  - x. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Mekarwangi
  - y. Pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas Mulyaharja
  - z. Kontribusi Kebun Raya Bogor
  - aa. Penerusan bunga pinjaman kepada PDAM Tirta Pakuan
  - bb. Sewa rusunawa

Ukuran yang digunakan dalam menilai Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Gambar 2. 1 Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah

(Mahmudi : 2010)

$$\text{Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Adapun kriteria kontribusi yang dinilai dalam persentase kriteria kinerja keuangan menurut tahun 1991 yang dibagi menjadi lima kriteria yaitu Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB).

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
<10 %	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Abdul Halim (2008:223)

Menurut (Mahmudi, 2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Menurut (Herjanti dan Teg, 2020) efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Adapun kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 (Mahmudi, 2010:143) dalam (Herjanti dan Teg, 2020)

## 2.2. Pertumbuhan Ekonomi

### 2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Irman, Purwati dan Juliyanti, 2020).

Dalam teori ekonomi banyak teori-teori dan model-model mengenai pertumbuhan ekonomi baik yang berasal dari mashab klasik, neoklasik maupun yang

moderen (Keynesian). Teori pertumbuhan ekonomi yang masih relevan hingga kini misalnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik dari Adam Smith dan David Ricardo, alasannya teori pertumbuhan ekonomi klasik ini bertumpu pada kekuatan modal dan SDM sebagai tulang punggung peningkatan pendapatan nasional.

Menurut (Siregar, 2015) pemerintah daerah menggunakan data dan kondisi daerah untuk membentuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD. Dalam penelitian (Rifda Atiqoh Daulay, 2020) menjelaskan bahwa secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Menurut (Indriyani, 2019) pertumbuhan ekonomi adalah meningkat atau menurunnya pendapatan dari tahun ke tahun karena terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa.

Gambar 2. 2 *National Income Accounting*

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

$Y$  = *Gross Domestic Product (GDP)*

$C$  = *Consumption Spending by Households*

$I$  = *Investments by Bussiness and Households*

$G$  = *Government Purchase of Goods and Services*

$(X - M)$  = *Net Exsport*

### 2.2.2. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu:

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

## 2. Sumber Daya Alam (SDA)

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud adalah kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

## 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

## 4. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sebagainya.

## 5. Sumber Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

## 6. Inflasi

Inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan suatu barang atau jasa dan/atau meningkatnya harga produk. Perubahan inflasi dapat mempengaruhi PDB setiap tahunnya.

Menurut Sadono Sukirno (2000) pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD.

### 2.2.3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu :

#### 1. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Produk Nasional Bruto/PNB dalam bahasa Indonesia atau *Gross National Product/GNP* adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya.

Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya.

#### 2. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Cara perhitungan Produk Domestik Bruto/PDB atau *Gross Domestic Product (GDP)* berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya.

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti PNB, yang mana membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya.

### 2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bogor, konsep dasar dari Produk Domestik Regional Bruto antara lain:

#### 1. Wilayah Domestik dan Regional

Pengertian domestik/regional merupakan Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen)

#### 2. Produk Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa

sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dalam ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

### 3. Produk Regional

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

### 4. Residen dan Non-Residen

Unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit, dikatakan sebagai residen bila mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non profit tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun). Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang konsep residen dan non-residen suatu unit institusi adalah antara lain,

- 1) Penduduk suatu daerah adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik daerah tersebut, kecuali :
  - wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) daerah lain yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 1 tahun yang bertujuan untuk bertamasya atau berlibur, berobat, beribadah, kunjungan keluarga, pertandingan olahraga nasional/internasional dan konferensi-konferensi atau pertemuan lainnya, dan kunjungan dalam rangka belajar atau melakukan penelitian;
  - awak kapal laut dan pesawat udara luar negeri/luar daerah yang kapalnya sedang masuk dok atau singgah di daerah tersebut;
  - pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 1 tahun, pegawai perusahaan asing dan pegawai perusahaan daerah lainnya yang berada di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 1 tahun, misalnya untuk tujuan memasang jembatan atau peralatan yang dibeli dari mereka;
  - pekerja musiman yang berada dan bekerja di wilayah domestik daerah tersebut, yang bertujuan sebagai pegawai musiman saja;

- anggota Korps Diplomatik, konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut;
- 2) Organisasi internasional adalah bukan residen di wilayah dimana organisasi tersebut berada namun pegawai badan internasional/nasional tersebut adalah bukan penduduk daerah tersebut jika melakukan misi kurang dari 1 tahun.
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

#### 6. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

#### 7. Produk Domesik regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk

Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

#### 8. Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

#### 9. Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

##### 1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas, dan Air Bersih
- Konstruksi

- Perdagangan, Hotel, dan Restoran
  - Pengangkutan dan Komunikasi
  - Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan
  - Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
  - Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.
- 2) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- Pengeluaran konsumsi pemerintah
- Perubahan inventori, dan
- Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Setelah melihat pada uraian PDRB di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu (1 tahun). PDRB merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Ekonomi Daerah} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Gambar 2. 3 Rasio Pertumbuhan Ekonomi

Ukuran yang digunakan untuk menilai Pertumbuhan Ekonomi

(sirusa.bps.go.id)

Keterangan:

PDRB<sub>t</sub> = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB<sub>t-1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum t

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor-sektor ekonomi dari tahun-ketahun, yang diukur dengan menggunakan rumus di atas. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Suandi, 2016).

### **2.2.5. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/provinsi dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Hal ini dilihat dari besaran nilai PDRB, maka sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen maupun agregat dimana pertumbuhan ekonomi bergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi yaitu penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal. Dengan teroptimisasinya PAD yang diprosikan sebagai akumulasi modal berarti hal ini juga sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen tersebut yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besaran nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari endogen atau di dalam daerah itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan PAD yang terdiri dari diantaranya pajak dan retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sangat bergantung dari intensitas kegiatan perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Miller dan russex (1997), dalam Ismail Hasan yang meneliti tentang pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, pertama: peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi publik dapat ditekan atau *corporate income tax* ditingkatkan, kedua: apabila *sales tax* dan pajak lainnya digunakan untuk *transfer payment*, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila *corporate income tax* digunakan untuk *transfer payment* maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, ketiga: pajak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.

### 2.3. Penelitian Sebelumnya

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa tesis maupun jurnal-jurnal melalui internet.

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini maka selain dari kajian teori yang telah dipaparkan, dilakukan juga review terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini didasarkan atas kesamaan objek penelitian, yaitu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis sesuai dengan penelitian saat ini antara lain :

Tabel 2. 4 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Muhamad Yasin,  Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur  (2020)	Variabel independent:  Pendapatan Asli Daerah Belanja Pembangunan  Variabel dependen:  Pertumbuhan Ekonomi	Indikator:  Rasio Efisiensi  Rasio Efektivitas  Rasio Kemandirian  Rasio Aktivitas	Pendekatan kualitatif dan kuantitatif	1. PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di kabupaten dan kota se-Jawa Timur adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.245 (>1,96). Nilai <i>original sample estimate</i> adalah negatif yaitu sebesar 0.115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah adalah positif.  2. Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					signifikan dengan t-statistik sebesar 2.759 (>1,96). Nilai <i>original sample estimate</i> adalah positif yaitu sebesar 0.105 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.
2	Novi Liana, Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dihubungkan Pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor (2017)	Variabel independent: Pendapatan Asli Daerah Pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor	Indikator: Melakukan sosialisasi Meningkatkan profesionalisme pegawai Menyediakan sarana dan prasarana Menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan	Pendekatan yuridis normatif	1. Dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah, yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana serta prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan. 2. Ada banyak faktor yang

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain: Perangkat hukum di daerah, petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum, kurangnya informasi serta sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak serta retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo, masih lemahnya pengawasan termasuk instrumennya,se</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					hingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3	Erlinda Siagian,  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016  (2018)	Variabel independent:  Pendapatan Asli Daerah  Dana Alokasi Umum  Dana Alokasi Khusus  Variabel dependent:  Pertumbuhan Ekonomi	Indikator:  Rasio kemandirian keuangan pendapatan asli daerah  Rasio pertumbuhan	Pendekatan kuantitatif  Metode dokumentasi	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x1y}$ ) sebesar 0,852, koefisien determinasi ( $r^2_{x1y}$ ) sebesar 0,726 dan nilai thitung 9,362 > ttabel 1,69552.  2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan angka korelasi ( $r_{x2y}$ ) sebesar 0,381, koefisien determinasi ( $r^2_{x2y}$ ) sebesar 0,145 dan nilai

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>2,346 &gt; ttabel 1,69552.</p> <p>3. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (<math>r_{xy}</math>) sebesar 0,015, koefisien determinasi (<math>r^2_{xy}</math>) sebesar 0,000225 dan nilai thitung 0,088 &lt; ttabel 1,69552.</p> <p>4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (<math>R_{y(1,2,3)}</math>) sebesar 0,868 dan besarnya koefisien determinasi (<math>R^2_{y(1,2,3)}</math>) adalah</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					0,754. Hasil pengujian statistik uji F diketahui Ftabel yaitu 2,91 dan Fhitung sebesar 31,628 sehingga Fhitung > Ftabel.
4	Elsi Suweni  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Cilegon Tahun 2008-2015  (2020)	Variabel Independent:  Pendapatan Asli Daerah  Variabel dependent:  Pertumbuhan Ekonomi	Indikator:  Rasio kemandirian pendapatan asli daerah  Rasio pertumbuhan ekonomi	Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder runtun waktu ( <i>time series</i> )	1. Berdasarkan hasil uji t statistik yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon dengan dilihat dari nilai thitung lebih besar dari ttabel dengan demikian hipotesis dapat diterima yakni H0 ditolak yang menyatakan tidak ada pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan Ha diterima yang menyatakan berpengaruh signifikan secara positif

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon.</p> <p>2. Berapa besar hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dan variabel pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Koefisien Determinasi atau R Square. Dalam penelitian ini hubungan antar variabel pendapatan asli daerah dan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,901 persen.</p>
5	<p>Indriyani</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2011-2017</p> <p>(2019)</p>	<p>Variabel independent:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel dependent:</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Indikator:</p> <p>Rasio kemandirian pendapatan asli daerah</p> <p>Rasio pertumbuhan ekonomi</p>	Pendekatan kuantitatif	<p>1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan hasil pengujian t memiliki signifikansi <math>0,002 &lt; 0,05</math> dan t hitung <math>7,719 &gt; t_{tabel} = 2,77845</math>. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>Daerah mengalami peningkatan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2011-2017.</p> <p>2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Depok. Hal ini dibuktikan dengan nilai <math>0,152</math> yang lebih besar dari <math>0,05</math> dan <math>T</math> hitung sebesar <math>1,766 &lt; 2,77845</math>. Dengan ini menunjukkan bahwa Belanja Modal pada Pemerintah Kota Depok tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Depok. Hal ini</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>dibuktikan dengan signifikan 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 dan F hitung 154,058 ? Ftabel 8,94. Secara simultan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, sedangkan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
6	<p>Ida Ayu Saraswati, I Wayan Ramantha, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta Sebagai Pemoderasi (2018)</p>	<p>Variabel independent: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel dependent: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Investasi Swasta</p>	<p>Indikator:</p> <p>Rasio kemandirian pendapatan asli daerah</p> <p>Rasio efektifitas belanja modal</p> <p>Rasio pertumbuhan</p>	<p>Pendekatan kuantitatif asosiatif</p>	<p>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini terjadi karena semakin tinggi PAD maka akan semakin bagus pertumbuhan ekonomi di Bali.</p> <p>2. Belanja modal sebagai moderasi memperlemah pengaruh</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini kemungkinan diakibatkan pemerintah daerah masih kurang maksimal dalam melakukan kajian serta pemeriksaan atas penggunaan belanja modal pada masing-masing daerah. Investasi swasta sebagai moderasi memperkuat pengaruh hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penanaman modal dari investor swasta yang secara merata di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang mengakibatkan adanya penerapan tenaga kerja, sehingga dapat</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					mempengaruhi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.
7	Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana, Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali (2018)	Variabel independent: Pendapatan Daerah Variabel dependent: Pertumbuhan Ekonomi	Indikator: Rasio kemandirian pendapatan asli daerah Rasio pertumbuhan ekonomi	Pendekatan kuantitatif bentuk asosiatif	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya juga semakin tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila semakin tingginya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>pengalokasian realisasi DAU yang diberikan dari pemerintah pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena DAU secara keseluruhan tidak digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil tersebut menandakan bahwa pemberian pengalokasian realisasi DAK oleh pemerintah pusat yang semakin tinggi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang negatif</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa peorlehan DBH oleh pemerintah daerah yang semakin tinggi DBH yang maka akan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena secara keseluruhan DBH kurang berkontribusi untuk peningkatan daerahnya.</p>
8	<p>Avicenna S Hidayat, Frederic Winston Nalle, Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan</p>	<p>Variabel independent: Belanja Pemerintah Tenaga Kerja Pendapatan Asli Daerah Variabel dependent:</p>	<p>Indikator: Rasio kemandirian pendapatan asli daerah Rasio pertumbuhan</p>	<p>Metode regresi data panel</p>	<p>1. Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Besarnya alokasi belanja yang salah satunya digunakan untuk pembentukan modal menjadi</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (2017)	Pertumbuhan Ekonomi Regional			<p>penyokong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu belanja pemerintah barang dan jasa menjadi pemasukan bagi rumah tangga dan menghasilkan <i>multiplier effect</i> dengan meningkatkan daya beli masyarakat.</p> <p>2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingka produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.</p> <p>3. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>Jawa Timut, karena PAD merupakan indikator potensi yang telah digali di suatu wilayah. Maka semakin tinggi PAD yang didapat dipungut, penerimaan pemerintah daeah juga semakin tinggi. begitu pula dengan tingkat kemandirian daerahnya. Ini juga memperlihatkan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, misalnya melalui pembangunan infrastruktur.</p>
9	<p>Anita Sri Wahyuni,</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan</p>	<p>Variabel independent:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Variabel dependent:</p> <p>Pertumbuhan</p>	<p>Indikator:</p> <p>Rasio kemandirian keuangan pendapatan asli daerah</p> <p>Rasio pertumbuhan ekonomi</p>	Pendekatan Kuantitatif	<p>1. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, berarti secara langsung pendapatan asli daerah</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Ekonomi Kota Surakarta  (2020)	Ekonomi			<p>mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.</p> <p>2. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, berarti secara langsung dana lokasi umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.</p> <p>3. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, berarti secara langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Lokasi Umum mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta.</p>
10	Rifda Atiqoh Daulay,	Variabel independent:	Indikator:	Pendekatan Kuantitatif	1. Ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019  (2020)	Belanja Modal  Pendapatan Asli Daerah  Variabel dependent:  Pertumbuhan Ekonomi	Rasio kemandirian keuangan pendapatan asli daerah  Rasio efektivitas belanja modal  Rasio pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.  2. Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.  3. Ada pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019. Hasil dari nilai R-Square diketahui bernilai 62,3% artinya menunjukkan bahwa sekitar 62,3% variabel pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dan sisanya 67,7% pertumbuhan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
11	<p>Dewi Chhristianty Paat, Rosalina A.M.Koleangan, Vekie A. Rumate</p> <p>Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung</p> <p>2015</p>	<p>Variabel Independent : PAD dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Indikator :</p> <p>Rasio Kemandirian Keuangan PAD</p> <p>Rasio Pertumbuhan Ekonomi</p>	Analisis Jalur	<p>1. Hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung.</p> <p>2. Hasil estimasi didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menekan tingkat kemiskinan di Kota Bitung. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Walaupun ada kenaikan kemiskinan akibat dari adanya kenaikan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat akan tetapi tidak berpengaruh signifikan.</p>
12	<p>Irmal Suandi</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Variabel Independen : PAD</p> <p>Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Indikator :</p> <p>Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Rasio Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>kuantitatif berdasarkan dimensi waktu, atau data <i>time series</i> (runtut waktu) dengan menganalisis data yang termuat dalam</p>	<p>Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, <i>Dummy</i> Kota Makassar, <i>Dummy</i> Kota Palopo dan <i>Dummy</i> Kota Pare-pare berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	2016			Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Periode 2003-2013	Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013, Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013, serta <i>Dummy</i> Kabupaten Selayar dan <i>dummy</i> Kabupaten Bantaeng berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2013.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

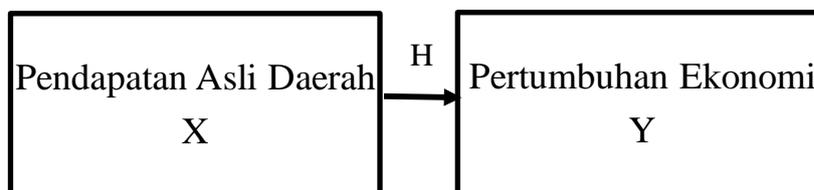
Dalam pemaparan sebelumnya, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teori yang menggambarkan antara variabel-variabel terkait.

##### 2.4.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Liana, 2017) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang sangat berpengaruh untuk daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam memompa serta mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom. Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh (Yasin, 2020) yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur bahwa arah

hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah adalah positif. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian (Kusumawati dan Wiksuana, 2018) bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien regresi pada variabel PAD membuktikan bahwa adanya pengaruh positif PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut :



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

H1 : Pendapatan Asli daerah di Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020 meningkat secara signifikan.

H2 : Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020 meningkat secara signifikan.

H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian verifikatif dengan metode *Explanatory Suvey* yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian verifikatif ini juga menjelaskan suatu fenomena empiris disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel berupa studi kasus optimalisasi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.

#### **3.2. Objek, Unit, dan Lokasi Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai *variable independent* dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *dependen*. Unit analisis dalam penelitian ini yang dilakukan adalah geografis regional, maksud dari geografis regional adalah wilayah/daerah/negara, sehingga data mengenai atau berasal dari (*respon*) suatu wilayah/daerah/negara tertentu.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada Pemerintah Kota Bogor.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Kota Bogor) dan data sekunder bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kota Bogor yaitu ([bogorkota.bps.go.id](http://bogorkota.bps.go.id)) Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu/orang dalam perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia seperti: media masa, perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang disediakan pada *statistic software*, dan sebagainya.

#### **3.4. Operasionalisasi Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen/Variabel Tidak Terikat/Variabel Bebas

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat/Variabel Tidak Bebas

Variabel Dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (X)	Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Rasio Pertumbuhan Ekonomi	$= \frac{(\text{PDRBt}-\text{PDRBt}-1)}{\text{PDRBt}-1} \times 100$	Rasio

**3.5. Metode Penarikan Sampel**

Penelitian ini menggunakan sampel dan data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020 yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor dan situs resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

**3.6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk data primer pada penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan dengan cara survey yaitu wawancara dan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengunduh data.

**3.7. Metode Analisis**

Data yang terkumpul diolah kemudian dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berupa pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dengan bantuan software SPSS Ver. 26. Dan kualitatif berupa melakukan wawancara secara langsung dan uraian mengenai variabel. Metode yang digunakan adalah menganalisa data dengan langkah-langkah yaitu statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis t.

### 3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengenai besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020.

Statistik deskriptif bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaruh keterkaitan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi (Kusumawati dan Wiksuana, 2018).

### 3.7.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut <sup>(Spssindonesia.com)</sup> analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa Inggris *simple linear regression* digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel *predictor* atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, yaitu dengan melihat PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi sebagai dependen

X = Pendapatan Asli Daerah sebagai independen

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi (kemiringan); besaran response yang ditimbulkan oleh *predictor*

nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

### 3.7.3. Pengujian Hipotesis

#### 3.7.3.1. Pengujian Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat

signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $\text{sig.} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, itu berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.
2. Jika nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $\text{sig.} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, itu berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha Kota Bogor

Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak 59 km sebelah selatan Jakarta, dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Dahulu luasnya 21,56 km<sup>2</sup>, namun kini telah berkembang menjadi 118,50 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 1.030.720 jiwa (2014). Bogor dikenal dengan julukan kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 Kelurahan. Pada masa Kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg (pengucapan: boit'n-zôrkh", bæit'-) yang berarti "tanpa kecemasan" atau "aman tenteram".

#### 1) Visi dan Misi Kota Bogor :

- Visi Kota Bogor 2019-2024

"Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga".

- Misi Kota Bogor 2019-2024

1. Mewujudkan Kota yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

- Program Unggulan Kota Bogor :

1. Pengembangan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Penguatan Spiritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani
3. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani

#### 2) Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari

permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26' C dengan suhu terendah 21,8' C dengan suhu tertinggi 30,4' C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari. Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan.

3) Ketinggian

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

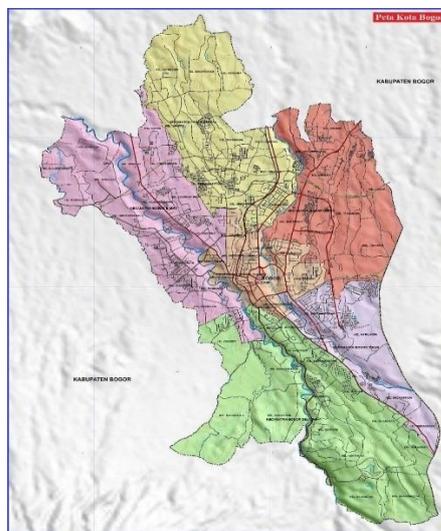
4) Iklim

Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26' C dengan suhu terendah 21,8' C dengan suhu tertinggi 30,4' C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

5) Letak Administratif

Letak Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Bogor

#### 4) Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bogor

Kota Bogor memiliki BUMD yang berpengaruh juga terhadap pendapatan daerah di Kota Bogor itu sendiri, BUMD tersebut terdiri dari :

1. PDAM
2. PD Bank Pasar
3. PD Jasa Transportasi
4. PD Pasar

#### 4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

##### 1. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menjelaskan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi kedudukan, jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah, tanggung jawab, rentang kendali serta sistem pimpinan organisasi.

##### 2. Uraian Tugas

Uraian tugas merupakan suatu paparan atas semua tugas dari setiap jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

##### a. Bagian Organisasi

##### **Tugas Pokok:**

Melaksanakan sebagian fungsi Asisten Tata Praja di bidang pengelolaan, pengkajian dan analisa jabatan, ketatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur.

##### **Fungsi :**

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kelembagaan, dan analisa jabatan, ketatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang penataan organisasi ;
- 3) Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang penataan organisasi yang meliputi kelembagaan dan analisa jabatan, ketatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur;
- 4) Pengendalian jalannya organisasi seluruh Perangkat Daerah;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan program pendayagunaan aparatur Negara di daerah.
- 6) Pengaturan sistem ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi kegiatan;
- 8) Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

##### **Bagian Organisasi membawahkan :**

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- 3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.

## **b. Sub Bagian Kelembagaan dan analisa jabatan**

### **Tugas Pokok:**

Melaksanakan sebagian fungsi Bagian Organisasi dalam merencanakan, mengkaji, menyusun serta mengevaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah serta pelaksanaan analisa jabatan.

### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan;
2. Penyiapan draft kebijakan dalam membentuk, menyempurnakan dan perubahan organisasi perangkat daerah;
3. Pengkoordinasian kegiatan di bidang penataan kelembagaan dan analisa jabatan;
4. Penganalisaan kelembagaan perangkat daerah dan pelaksanaan analisa jabatan;
5. Pelaksanaan administrasi dan dokumentasi kegiatan;
6. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

## **c. Sub Bagian Ketatalaksanaan**

### **Tugas Pokok:**

Melaksanakan sebagian fungsi Bagian Organisasi dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan, system dan prosedur seta kegiatan ketatalaksanaan lainnya.

### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan;
2. Penyiapan draft kebijakan di bidang ketatalaksanaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan tugas, pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan;
4. Penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur;
5. Pelaksanaan administrasi dan dokumentasi kegiatan serta ketatausahaan bagian;
6. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

## **d. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur**

### **Tugas Pokok:**

Melaksanakan sebagian fungsi Bagian Organisasi dalam menyusun, menganalisa dan melaksanakan program Pendayagunaan Aparatur di daerah.

### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan aparatur;
2. Penyiapan draft kebijakan kegiatan pendayagunaan aparatur;
3. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan program pendayagunaan aparatur;

5. Pelaksanaan administrasi dan dokumentasi kegiatan;
6. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

#### 4.2. Kondisi/Fakta/Pelaksanaan/Realisasi dari Variabel yang Diteliti Pemerintah Kota Bogor

##### 1. Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan keuangan Pendapatan Asli Daerah diukur dengan menggunakan Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah. Rasio tersebut bertujuan mengukur seberapa besar suatu daerah dapat membiayai pengeluarannya menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor pada periode 2015-2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kota Bogor  
Tahun 2015-2020  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2015	Rp398.435	Rp46.216	Rp28.807	Rp154.134	Rp627.592
2016	Rp492.138	Rp62.727	Rp33.107	Rp195.900	Rp783.872
2017	Rp555.475	Rp49.043	Rp29.949	Rp343.729	Rp978.196
2018	Rp592.978	Rp48.418	Rp26.772	Rp224.028	Rp892.196
2019	Rp689.526	Rp51.362	Rp28.241	Rp246.737	Rp1.015.866
2020	Rp509.042	Rp35.009	Rp31.927	Rp264.435	Rp840.413

Sumber : Bapenda Kota Bogor (Diolah oleh Penulis 2021)

Tabel 4. 2 Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kota Bogor  
Tahun 2015-2020  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jumlah
2015	Rp627.594	Rp814.953	Rp470.659	Rp1.913.206
2016	Rp783.873	Rp1.097.614	Rp270.882	Rp2.152.369
2017	Rp978.197	Rp1.072.486	Rp238.675	Rp2.289.358
2018	Rp892.197	Rp1.066.762	Rp349.742	Rp2.308.701
2019	Rp1.015.868	Rp1.106.494	Rp368.821	Rp2.491.183
2020	Rp840.415	Rp1.083.171	Rp373.977	Rp2.297.563

Sumber Bapenda Kota Bogor diolah oleh penulis 2021

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah pada tabel 4.1 dan data Pendapatan daerah pada tabel 4.2 pemerintah Kota Bogor, maka didapatkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bogor pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kota Bogor  
Tahun 2015-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (%)
2015	Rp627.594	Rp1.913.207	32,8
2016	Rp783.873	Rp2.152.370	36,4
2017	Rp978.197	Rp2.289.359	42,7
2018	Rp892.197	Rp2.328.703	38,3
2019	Rp1.015.868	Rp2.491.184	40,8
2020	Rp840.415	Rp2.297.564	36,6

Sumber : Bapenda Kota Bogor diolah oleh penulis 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh informasi kemampuan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah kota Bogor. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015 memiliki persentase terendah 32,8% pada tahun 2015 yang berarti cukup baik. Tahun 2016 memiliki persentase 36,4% yang berarti cukup baik. Tahun 2017 memiliki persentase 42,7% yang berarti baik. Tahun 2018 memiliki persentase 38,3% yang berarti cukup baik. Tahun 2019 memiliki persentase 40,8% yang berarti baik. Tahun 2020 memiliki persentase 36,6% yang berarti cukup baik.

Pemkot Bogor meraih penghargaan atas Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Bintang Dua dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2016. Melalui penghargaan ini LPPD Kota Bogor masuk dalam 18 besar penilaian terbaik (SZ-Hari, 2018).



Sumber : Bapenda Kota Bogor diolah oleh penulis 2021

Gambar 4. 2 Grafik Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020

Dilihat dari tabel dan gambar di atas pada tahun 2015 rasio kemampuan keuangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 32,8%, ditahun 2016 menurun sebesar 36,4%, di tahun 2017 meningkat sebesar 42,7%, namun kembali turun di tahun 2018 sebesar 38,3%, ditahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 40,8%, dan di tahun 2020 turun kembali menjadi 36,6%. Dari data tersebut, rentang tahun 2015-2020 yang paling menghasilkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah di tahun 2017 dengan 42,7% persentasenya.

Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih dalam Rp	Selisih dalam %
2015	Rp627.815	Rp627.594	-Rp221	99,96
2016	Rp728.030	Rp783.873	Rp55.843	107,6
2017	Rp917.788	Rp978.197	Rp60.409	106,58
2018	Rp887.396	Rp892.197	Rp4.801	102,79
2019	Rp972.607	Rp1.015.868	Rp43.261	104,45
2020	Rp741.531	Rp840.415	Rp98.884	113,34

Sumber : Bapenda Kota Bogor ( Diolah oleh penulis 2021)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dari tahun 2015-2020 lebih besar daripada yang dianggarkan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah naik setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah turun karena adanya pandemi covid

sehingga anggarannya pun diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Boogor. Sehingga Pemerintah Kota Bogor memerlukan pengoptimalan agar dapat terus melampaui dari target yang dianggarkan. Pada tahun 2015 Efektivitas 99,96% yang berarti efektif. Tahun 2016 hingga tahun 2020 efektivitas lebih dari 100% yang artinya sangat efektif Kota Bogor dalam memaksimalkan anggaran yang ada.

Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kota Bogor  
Tahun 2015-2020  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih dalam Rp	Selisih dalam %
2015	Rp2.022.270	Rp1.913.207	-Rp109.063	94,61
2016	Rp2.158.083	Rp2.152.370	-Rp5.713	99,74
2017	Rp2.311.874	Rp2.289.359	-Rp22.515	99,03
2018	Rp2.334.692	Rp2.328.703	-Rp5.989	99,74
2019	Rp2.639.970	Rp2.491.184	-Rp148.786	94,36
2020	Rp2.128.002	Rp2.297.564	Rp169.562	97,23

Sumber Bapenda Kota Bogor diolah oleh penulis 2021

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa efektivitas kinerja keuangan pendapatan daerah di kota Bogor tahun 2015-2020 cukup efektif karena memiliki rentang persentase 90%-99%. Dilihat dari selisih lebih pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan memiliki selisih kurang hanya pada tahun 2020. Maka selisih yang paling tinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu Rp148.786 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan selisih paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -Rp169.562 (dalam jutaan rupiah).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB), dalam penelitian ini menggunakan lingkup regional yaitu tingkat kota dan kabupaten, maka pertumbuhan ekonomi ini diukur menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bogor. Data tersebut didapat melalui website resmi Badan Pusat Statistika Kota Bogor, sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  
Pemerintah Kota Bogor  
Tahun 2015-2020  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto
2015	Rp25.298.604
2016	Rp27.002.252
2017	Rp28.654.971
2018	Rp30.413.575
2019	Rp32.253.510
2020	Rp32.083.513

(Sumber : bpskotabogor.go.id diolah oleh penulis 2021)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2019 produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di kota Bogor selalu meningkat setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya. Menurut (Purwanto, 2021) semua kelesuan ekonomi Karena hamper seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab covid-19.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari (Paat, Koleangan dan Rumate, 2019) bahwa Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan memperbesar kapasitas ekonomi (PDRB-Produk Domestik Regional Bruto). Sehingga dengan PDRB yang tinggi maka akan tercipta *trickle down effect* sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Berhubung pertumbuhan sedang mengalami resersi maka, otomatis PDRB pun mengalami penurunan.

Dari data Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor tahun 2015-2020, didapatkan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Rumus ukuran yang digunakan untuk Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, dibuat perhitungan untuk mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi kota Bogor tahun 2015-2020 di bawah ini :

Tabel 4. 7 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor  
Tahun 2015-2020  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Rasio Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2015	$= \frac{(25.298.604-25.298.604-1)}{25.298.604-1} \times 100\%$	6,14
2016	$= \frac{(27.002.252-25.298.604-1)}{25.298.604-1} \times 100\%$	6,73
2017	$= \frac{(28.654.971-27.002.252-1)}{27.002.252-1} \times 100\%$	6,12
2018	$= \frac{(30.413.575-28.654.971-1)}{28.654.971-1} \times 100\%$	6,14
2019	$= \frac{(32.253.510-30.413.575-1)}{30.413.575-1} \times 100\%$	6,05
2020	$= \frac{(32.083.513-32.253.510-1)}{32.253.510-1} \times 100\%$	-0,53

Sehingga hasil presentase grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor yaitu :



(Sumber : BPS Kota Bogor Diolah oleh penulis 2021)

Gambar 4. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor  
Tahun 2015-2020

Berdasarkan hasil perhitungan dan grafik tersebut, Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor masih cenderung fluktuatif atau naik turun dari tahun 2015-2020. Sebagaimana dalam gambar 4.4 tahun 2015 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor sebesar 6,14%, lalu naik 0,59% sehingga pada tahun 2016 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor sebesar 6,73%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,61% sehingga menjadi 6,12%. Tahun 2018 mengalami kenaikan 0,2% menjadi 6,14%. Tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,09% sehingga menjadi 6,05%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis 6,58% sehingga pada tahun 2020 persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor -0,53%, hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi.

### 4.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data setelah semua sumber data terkumpul menjadi informasi baru agar karakteristik data tersebut mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis yang terdiri dari statistik deskriptif dan uji hipotesis t. Penelitian ini menggunakan software SPSS Ver. 26, berikut penjelasannya.

#### 4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji deskriptif suatu data menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis deskriptif penulis lakukan dengan menggunakan software SPSS Ver 26 yang kemudian memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	6	627594.00	1015868.00	856357.333	141006.2680
PE	6	25298604.00	32253510.00	29284404.17	2807726.271
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 26 (2021)

Dari output statistik deskriptif pada tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. N = 6 berarti jumlah data yang diolah dalam penelitian ini adalah 6, data selama 6 tahun yang terdiri dari data variabel Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pendapatan Asli Daerah terendah tercatat sebesar Rp627.594 sedangkan yang tertinggi Rp1.015.868 dengan rata-rata Rp856.357,3 dan standar deviasi Rp141.006,27 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar +Rp141.006,27, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -Rp141.006,27.
3. Pertumbuhan Ekonomi terendah tercatat Rp25.298.604 sedangkan tertinggi Rp32.253.510 dengan rata-rata 29.284.404,17 dan standar deviasi Rp2.807.726,271 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar +Rp2.807.726,271 dan penurunan

maksimum dari rata-rata variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar - Rp2.807.726,271.

#### 4.3.2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independent. Dalam analisis regresi linear sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti model kuadratik, perubahan x diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan tersebut bersifat tidak linear (Huang).

Tabel 4. 9 Uji Koefisien Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16621864.422	5774345.779		2.879	.045
	PAD	14.787	6.668	.743	2.218	.091

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Output pengolahan dari SPSS 26 (2021)

Dari tabel di atas dapat di ketahui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 16621864.422 + 14,787X$$

Koefisien regresi secara parsial yang ditunjukkan pada Tabel di atas mendapatkan hasil bahwa:

- Konstanta sebesar Rp16.621.864,42 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar Rp16.621864,42 jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi akan menurun jika tidak ada Pendapatan Asli Daerah.
- Koefisien regresi X sebesar 14,787 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pertumbuhan Ekonomi, maka nilai Pertumbuhan Ekonomi bertambah sebesar 14,787. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Pengambilan keputusan dalam analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

- Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,091 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi karena lebih dari  $0,05$ .
- Berdasarkan nilai  $t$  : diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,218 < t_{tabel} 2,77645$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Catatan : mencari  $t_{tabel}$

$$\begin{aligned}
 T_{tabel} &= (\alpha/2 ; n-k-1) \\
 &= (0,05/2 ; 6-1-1) \\
 &= (0,025 ; 4) \\
 &= 2,77645
 \end{aligned}$$

#### 4.3.3. Analisis Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis uji koefisien secara parsial (uji  $t$ ).

##### 1. Uji koefisien regresi secara parsial (uji $t$ )

Uji  $t$  atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial independent berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau  $0,05$ . Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

3. Jika nilai  $t$  hitung  $< t_{tabel}$  atau sig.  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, itu berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.
4. Jika nilai  $t$  hitung  $> t_{tabel}$  atau sig.  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, itu berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial Uji  $t$

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16621864.422	5774345.779		2.879	.045
	PAD	14.787	6.668	.743	2.218	.091

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil output pengolahan data SPSS 26 (2021)

Koefisien regresi secara parsial yang ditunjukkan pada tabel di atas mendapatkan hasil bahwa:

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_3$  diterima, dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_3$  ditolak. Dilihat dari hasil tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,091 yang berarti  $>$  dari 0,05 dan Thitung sebesar 0,743. Karena pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,091 > 0,05$ ) dimana nilai t hitung  $<$  t tabel ( $2,218 < 2,77645$ ) maka  $H_3$  nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### **4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian**

##### **4.4.1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Kota Bogor sendiri Pendapatan Asli Daerah cukup baik karena pada tahun 2015-2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang sudah dianggarkan. Namun, umumnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor naik setiap tahunnya namun karena pada tahun 2020 terdapat pandemic covid, Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor pun menurun. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari 4 sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut yang paling banyak menyumbang adalah pajak daerah. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan, karena salah satu program unggulan Kota Bogor adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif maka dari itu dapat mengundang wisatawan dari Bogor maupun luar Bogor untuk berkunjung ke Kota Bogor yang nantinya dapat menambah penghasilan Kota Bogor melalui Pajak hotel, Pajak restoran, dan Pajak hiburan tersebut. Kota Bogor memiliki potensi penerimaan melalui pajak masih dapat ditingkatkan dengan dilakukannya berbagai event tahunan dan gelaran yang dapat mengundang minat wisatawan untuk datang ke Kota Bogor untuk menikmati kuliner dan menginap di Hotel di Bogor. Sumber kedua yang menyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor adalah lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, serta potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pemkot Bogor selalu mengupayakan untuk meningkatkan PAD, dimulai dari pelayanan kepada masyarakat, yang kini tidak hanya secara konvensional datang ke kantor Bapenda tetapi para wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui bank, kantor pos, alfamart, indomaret, QRIS BJB mobil keliling, Tokopedia, buka lapak, link aja, blibli, gojek, PPOB Masago, dan PPOB bayarin aja. Selain itu, para calon wajib pajak juga dapat melapor spt melalui website online. Lalu, pada saat tahun 2020, Pandemi datang dan perekonomian pun sangat turun. Termasuk pemasukan daerah, karena saat pandemi semua dibatasi sampai dengan adanya karantina dan membekukan kegiatan agar memutus rantai virus covid-19. Pemerintah Kota Bogor terus mencari jalan agar penerimaan daerah tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti ini. Maka dari itu, terdapat kebijakan keringanan dalam membayar pajak untuk para wajib pajak seperti masa pembayaran pajak diperpanjang, pengurangan pajak terhutang BPHTB, bebas denda PBB, bebas sanksi administrasi pembayaran piutang pajak daerah (self), pengurangan pembayaran BPHTB, diskon pajak PBB P2 dan lain-lain untuk bulan Februari 25%, bulan Maret 15%, bulan April 10%, dan bebas denda dari tahun 2013-2021. Keringan-keringan tersebut dilakukan untuk meringankan WP namun daerah tetap ada penerimaan daerah seperti biasanya. Serta pelayanan pajak pun menjadi berbasis layanan elektronik seperti konsultasi via Whatsapp, layanan E-validasi BPHTB, E-Spt.

#### **4.4.2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020**

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor masih cenderung fluktuatif, terlebih pada saat tahun 2020, perekonomian di Kota Bogor mengalami resesi sehingga mengakibatkan pertumbuhannya menyentuh persentase negatif yaitu -0,53%. Salah satu indikator untuk melihat kemajuan perkembangan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan oleh daerah tersebut. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di daerah tersebut. Dengan demikian, PDRB merupakan cerminan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Kota Bogor terletak dekat dengan ibukota negara dan ibukota provinsi sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dibidang jasa dan perdagangan. Pemerintah Kota Bogor memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kota Bogor ini yaitu sektor pariwisatanya yang menjadi andalan dalam menggali potensi kota. Kota Bogor dinilai sebagai kota yang mandiri dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara kota dan kabupaten lainnya disekitar Jakarta sebagai

ibu kota negara. Perihal tersebut, Pemerintah Kota Bogor melakukan tahap-tahap agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat diantaranya :

- 1) Melakukan pemetaan posisi, potensi, serta peluang pertumbuhan ekonomi di Kawasan Bogor Raya secara keseluruhan (Bogor Raya adalah wilayah kota dan kabupaten serta sekitarnya).
- 2) Melakukan pemetaan di Kawasan Bogor Raya pada aspek politis dan administratifnya. Bagaimana tata Kelola pemerintahannya yang ideal.

Kota Bogor adalah Kota jasa dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga Pemerintah Kota Bogor menyiapkan infrastruktur yang menompang hal tersebut. Maka dari itu Kota Bogor memiliki destinasi lokal dengan karakteristik masing-masing yang dapat menarik wisatawan untuk ke Kota Bogor yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor. Pada saat tahun 2020 masa pandemi covid-19, pembangunan kota Bogor melambat dan berdampak pada menurunnya roda perekonomian di Kota Bogor. Banyak aspek yang terkena dampak pandemi covid-19 terutama dalam bidang infrastruktur, melambatnya infrastruktur juga mempengaruhi roda ekonomi. Dimasa pandemi seperti ini, kunci utama adalah protokol Kesehatan disamping dalam mengoptimalkan pemulihan ekonomi Kota bogor. Semakin hari Kota Bogor terus berupaya dalam memulihkan pertumbuhannya dengan cara menarik wisata alam bagi wisatawan, atau olahraga. Tak hanya itu, peran UMKM pun dalam memutar roda perekonomian berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian dari keterpurukan. Lalu, dimulai nya pemberian vaksin salah satu usaha untuk kesehatan, di Kota Bogor, pemberian vaksin ditempatkan di ballroom mall yang ada di Kota Bogor seperti botani, lippo mall ekalokasari, dan mall boxies. Hal tersebut bertujuan untuk menarik pengunjung juga untuk berbelanja dengan begitu ekonomi pun sedikit demi sedikit pulih. Maka dari itu, ada 5 program prioritas Pemkot Bogor yaitu Kesehatan, pemulihan ekonomi, Pendidikan, prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan realisasi janji kampanye.

#### **4.4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020**

Otonomi daerah diberlakukan bertujuan untuk kemandirian daerah, dimana masing-masing daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dengan tugas pembantuan. Maka dari itu, masing-masing daerah harus menggali potensi di daerah nya masing-masing agar daerah tersebut dapat lebih maju. Semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, maka suatu daerah dapat dikatakan lebih mandiri (Hidayat dan Nalle, 2017). Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik (Wahyuni, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bogor selalu mencari celah dan inovasi baru demi mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan. Sebab selama tahun 2015-2019 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor selalu melampaui target saat awal pandemi, target Pendapatan Asli Daerah sempat direvisi dan menyesuaikan kondisi, hal tersebut bertujuan agar tidak jauh antara realisasi dengan target PAD tersebut.

Dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai daerahnya dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pada hasil pengujian yang telah penulis dapatkan. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis awal yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Kondisi adanya pandemi covid-19 ini mengubah teori dan penelitian terdahulu sehingga yang semula variabel-variabel saling mempengaruhi, menjadi tidak saling mempengaruhi. Hal ini terkalahkan oleh faktor penting saat ini yaitu Kesehatan. Hal ini dikemukakan oleh Presiden RI Bapak Jokowi dalam (Bisnis.com, 2021) bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah kesehatan yang dinomor satukan dan ekonomi akan mengikuti dengan sendirinya, hal serupa dikemukakan oleh Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin bahwa kesehatan masyarakat menjadi faktor utama agar program pemulihan ekonomi negara bisa berjalan sukses (Maulandy Rizky Bayu Kencana, 2020). Maka dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai 0,091 yang lebih besar dari 0,05 dari  $t_{hitung}$  sebesar  $2,218 < t_{tabel} 2,77645$ . Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat PAD pada Pemerintah Kota Bogor tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor ini. Hasil penelitian serupa dengan penelitian (Paat, Koleangan dan Rumat, 2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Dan serupa dengan penelitian (Suandi, 2016) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020 (Pandemi Covid-19). Dengan menggunakan 1 variabel X yaitu PAD dan 1 variabel Y yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas dibab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah cukup baik karena pada tahun 2015-2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang sudah dianggarkan. Namun, umumnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor naik setiap tahunnya namun karena pada tahun 2020 terdapat pandemi covid-19, Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor pun menurun.
2. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor masih cenderung fluktuatif, terlebih pada saat tahun 2020, perekonomian di Kota Bogor mengalami resesi sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonominya menyentuh persentase negatif yaitu -0,53%.
3. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,091 yang lebih besar dari 0,05 dari  $t_{hitung}$  sebesar  $2,218 < t_{tabel}$  2,77645. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat PAD pada Pemerintah Kota Bogor tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor ini.

#### **5.2. Saran**

1. Saran untuk kegunaan akademik/teoritik

Pada umumnya secara teoritik di dalam mata kuliah Akuntansi Publik atau Akuntansi Pemerintahan, bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun pada penelitian kali ini adalah tidak adanya pengaruh antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi yang disebabkan masing-masing mengalami penurunan karena adanya kejadian luar biasa di tahun 2020 yaitu Pandemi Covid-19.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya harus mempertimbangkan variable independent yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama karena dengan hal itu penelitian dapat lebih akurat dan optimal. Variabel apa saja yang dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi karena variabel independent (Pendapatan Asli Daaerah) berkontribusi pada variabel dependen

(Pertumbuhan ekonomi) sebesar 55,1%. Sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi variabel independent lainnya yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Lalu, kegiatan apakah yang lebih banyak berkontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

3. Saran untuk kegunaan praktik

Pemerintah Kota Bogor diharapkan lebih mengoptimalkan lagi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan Kerjasama dengan pihak swasta maupun daerah agar pembangunan daerah Kota Bogor termasuk infrastruktur dapat berjalan lagi dan mewujudkan Kota jasa dan industri pariwisata ekonomi kreatif dengan ditunjang oleh pembangunan yang baik. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat disamping PAD yang meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

Akmaliyah, M. (2013) “OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ACEH TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ACEH TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.

Bisnis.com (2021) *Jokowi: Fokus Utama Penanganan Kesehatan, Ekonomi Akan Mengikuti*, TEMPO.CO. Tersedia pada: <https://bisnis.tempo.co/read/1383558/jokowi-fokus-utama-penanganan-kesehatan-ekonomi-akan-mengikuti/full&view=ok>.

BPS Kota Bogor (tanpa tanggal) *Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan*.

BPS Sirusa (tanpa tanggal) *Rasio Laju Pertumbuhan Ekonomi*, [sirusa.bps.go.id](https://sirusa.bps.go.id). Tersedia pada: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/3> (Diakses: 2 September 2020).

Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Progam IBM SPSS 23 (Edisi 9)*. Cetakan ke. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, R. (2020) *Kota Bogor naikkan target penerimaan pajak TA 2020 34,72 persen*, [antaranews.com](https://www.antaranews.com). Tersedia pada: <https://www.antaranews.com/berita/1246792/kota-bogor-naikkan-target-penerimaan-pajak-ta-2020-3472-persen> (Diakses: 15 Agustus 2020).

Herjanti, S. dan Teg, I. W. T. (2020) *Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Tersedia pada: <file:///C:/Users/User/Downloads/289-Article Text-991-1-10-20200606.pdf>.

Hidayat, A. S. dan Nalle, F. W. (2017) “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), hal. 71. doi: 10.22219/jep.v15i1.4647.

Huang, H. (tanpa tanggal) *Analisis Regresi Sederhana*, [globalstatistic.com](https://globalstatistic.com).

Indriyani (2019) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2011-2017*. Universitas Pakuan.

Irman, M., Purwati, A. A. dan Juliyanti (2020) “Analysis On The Influence Of Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Total Asset Turnover Toward Return On Assets On The Otomotive and Component Company That Has Been Registered In Indonesia Stock Exchange Within 2011-2017,” *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 1(1), hal. 36–44. doi: 10.37385/ijedr.v1i1.26.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2020) *Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi*,

- kemendagri.go.id*. Tersedia pada: <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/28776/kerja-sama-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-untuk-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi>.
- Kotabogor.go.id (2019) *Rakot Evaluasi, PAD Kota Bogor Terus diPacu, kotabogor.go.id*. Tersedia pada: [https://kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/12756](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/12756) (Diakses: 28 April 2021).
- Kusumawati, L. dan Wiksuana, I. G. B. (2018) “PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI,” *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(5), hal. 2592–2620.
- Liana, N. (2017) “Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dihubungkan pariwisata kota bogor dan kabupaten bogor,” *Jurnal Living Law ISSN*, 9(1). Tersedia pada: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/1373/1332>.
- Mahmudi (2010) *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Maulandy Rizky Bayu Kencana (2020) *Kesehatan Jadi Faktor Utama Suksesnya Pemulihan Ekonomi*, *www.liputan6.com*. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4318067/kesehatan-jadi-faktor-utama-suksesnya-pemulihan-ekonomi>.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M. dan Rimate, V. A. (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), hal. 1–10. doi: 10.35794/jpekd.15774.19.1.2017.
- Purwanto, A. (2021) *Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021*, *Kompas Pedia*. Tersedia pada: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021> (Diakses: 27 Juni 2021).
- Rahmawati, I., Somaji, R. P. dan Adenan, M. (2019) “Strategy for Optimizing Regional Original Income ( PAD ): Analysis Study of Banyuwangi District,” 6(7), hal. 10018–10025.
- Rifda Atiqoh Daulay (2020) *PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN. Tersedia pada: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>.
- Siregar, B. (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- SPSS Indonesia (tanpa tanggal) *Regresi Linear Sederhana*.
- Suandi, I. (2016) “Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan.”

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. kedua. Diedit oleh Sutopo. Yogyakarta: Alfabeta.

SZ-Hari (2018) *No Pemkot Bogor Raih Status Sangat Tinggi LPPD 2016*, [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id).

Wahyuni, A. S. (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta,” XX(09), hal. 1–9. Tersedia pada: <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2019/09/03/129/pertumbuhan-ekonomi-kota-surabaya-tahun-2018.html>.

Yasin, M. (2020) “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur,” *Journal of Economic, Business and Accounting*, 53(9), hal. 1689–1699.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antania Hanjanilia Ristiyana

Alamat : Kp. Muara RT 002 RW 008, Kel. Sindangrasa, Kec.  
Bogor Timur Kota Bogor, 16145

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14 Maret 1999

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Lawanggintung 2
- SMP : SMPN 3 Bogor
- SMA : SMAN 4 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2021  
Peneliti

(Antania Hanjanilia Ristiyana)

# LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Bogor

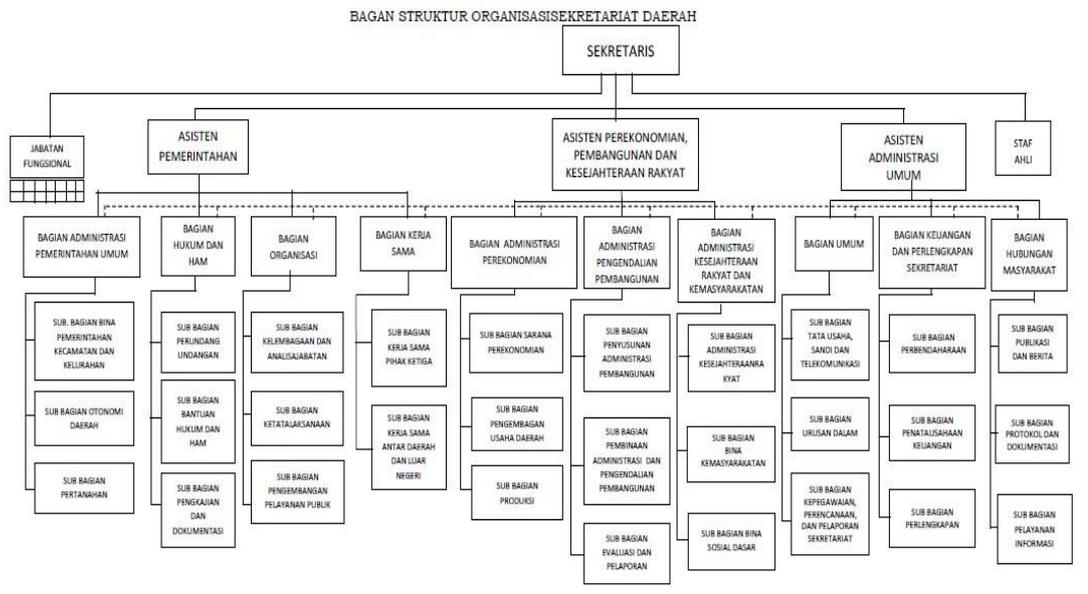
Tahun 2015-2020

Kategori	Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	253 951,95	269 243,76	280 254,86
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	5 998 600,60	6 538 497,43	7 064 824,32
Pengadaan Listrik dan Gas	1 925 046,85	1 970 649,85	1 949 764,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31 953,59	36 037,10	40 954,36
Konstruksi	3 647 802,34	3 937 651,67	4 381 382,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 088 063,38	7 643 843,99	8 168 746,73
Transportasi dan Pergudangan	3 776 163,74	4 210 072,72	4 638 128,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 421 383,40	1 586 007,85	1 749 963,32
Informasi dan Komunikasi	1 521 416,21	1 710 356,52	1 967 765,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	2 145 643,26	2 475 163,85	2 748 406,76
Real Estat	716 268,71	782 754,92	846 549,44
Jasa Perusahaan	675 244,69	746 138,04	799 337,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	955 878,40	1 019 031,66	1 080 886,89
Jasa Pendidikan	907 452,16	997 674,59	1 072 300,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374 124,90	425 778,60	490 454,37
Jasa Lainnya	925 906,78	1 051 908,75	1 198 753,54
Jumlah	32 364 900,96	35 400 811,31	38 478 473,74

Kategori	Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	293 700,70	305 493,20	317 861,10
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	7 840 380,20	8 351 600,10	8 285 399,30
Pengadaan Listrik dan Gas	1 917 407,30	1 967 250,10	1 814 864,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46 135,50	49 170,90	53 314,30
Konstruksi	4 937 626,30	5 615 544,00	5 283 735,70
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 697 451,70	9 388 980,40	8 967 697,20
Transportasi dan Pergudangan	5 252 716,10	5 988 705,30	5 765 779,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 008 792,50	2 199 470,30	2 269 202,70
Informasi dan Komunikasi	2 063 111,80	2 170 434,00	3 034 044,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	3 075 475,10	3 346 217,50	3 325 974,40
Real Estat	919 284,10	1 010 806,60	984 525,60
Jasa Perusahaan	890 568,60	1 046 281,00	935 529,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 174 496,70	1 239 619,00	1 202 430,40
Jasa Pendidikan	1 266 508,70	1 435 963,50	1 596 798,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	558 376,90	641 408,90	663 087,20
Jasa Lainnya	1 318 988,50	1 466 412,20	1 440 016,80
Jumlah	42 261 020,70	46 223 356,90	45 940 259,90

Sumber data : <https://bogorkota.bps.go.id/indicator/52/125/1/produk-domestik-regional-bruto-kota-bogor-menurut-lapangan-usaha.html>

Lampiran 2 Bagan Struktur Organisasi





**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 31 Telp. (0251) 8322871 Fax. (0251) 8337460  
BOGOR 16162

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/1557/Sekre/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharti, SE, M.Si  
NIP : 19651103 199103 2 003  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Alamat : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Menerangkanbahwa :

Nama : Antania Hanjanilia Ristiyana  
Tempat,tanggal lahir : Bogor, 14 Maret 1999  
NIM : 022117264  
Alamat : Jalan Raya Tajur Gg Babadak Kp Muara RT 002  
RW 008 No 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur  
Kota Bogor  
Pendidikan : S1 Akuntansi Universitas Pakuan Bogor

Telah Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Pada Tanggal 28 Juli s/d 28 September 2020 untuk Keperluan Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Suharti, SE, M.Si**  
NIP. 19651103 199103 2 003

Lampiran 4 Dokumentasi Foto

